



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan menggambarkan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Serta gambaran wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR**



TEUKU MULYA, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197206161999031002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 7 |
| A. Rencana Strategis..... | 7 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 9 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 11 |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 11 |
| B. Analisis Kinerja..... | 13 |
| C. Realisasi Anggaran | 17 |
| D. Analisis Efisiensi..... | 46 |
| E. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja di Level Pemerintah Daerah | 49 |
| BAB IV PENUTUP..... | 51 |
| LAMPIRAN | |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, diantaranya :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sudah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja utama sebesar 93.83%.

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Indikator tujuan yang hendak dicapai oleh DPKPP dapat diukur dengan indikator persentase permukiman layak. Target persentase permukiman layak sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99.83% dengan tingkat capaian sebesar 99.83%

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh DPKPP dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase penyediaan rumah layak huni
2. Persentase luas permukiman kumuh
3. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
4. Tingkat pelayanan unsur pertanahan

Dengan indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator kedua persentase penyediaan rumah layak huni dengan target 35.84% terealisasi sebesar 31.27% sehingga tingkat capaiannya menjadi 87.24%

2. Indikator ketiga persentase luas permukiman kumuh dengan target 100% terealisasi sebesar 0.021% sehingga tingkat capaiannya menjadi 93.12%
3. Indikator keempat persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dengan target 100% terealisasi secara keseluruhan yaitu 100%
4. Indikator keempat tingkat pelayanan unsur pertanahan dengan target 100% terealisasi sebanyak 88.96%

Adapun anggaran yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2023 sebesar 368.515.517.686 terealisasi 355.138.809.581 dengan realisasi anggaran 96.37% dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 94.98%.

Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan atas penyediaan perumahan dan permukiman secara keseluruhan
2. Meningkatkan optimalisasi pencapaian target kinerja agar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai serta meningkatkan pemahaman terkait ketentuan dan peraturan terkait pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan public sekaligus yang lebih responsive, professional, efektif dan efisien, sederhana, transparan, responsive dan adaptif sekaligus dapat membangun kualitas manusia, meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor secara optimal berupaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan anggaran, namun

juga didukung oleh semangat dan etos kerja melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

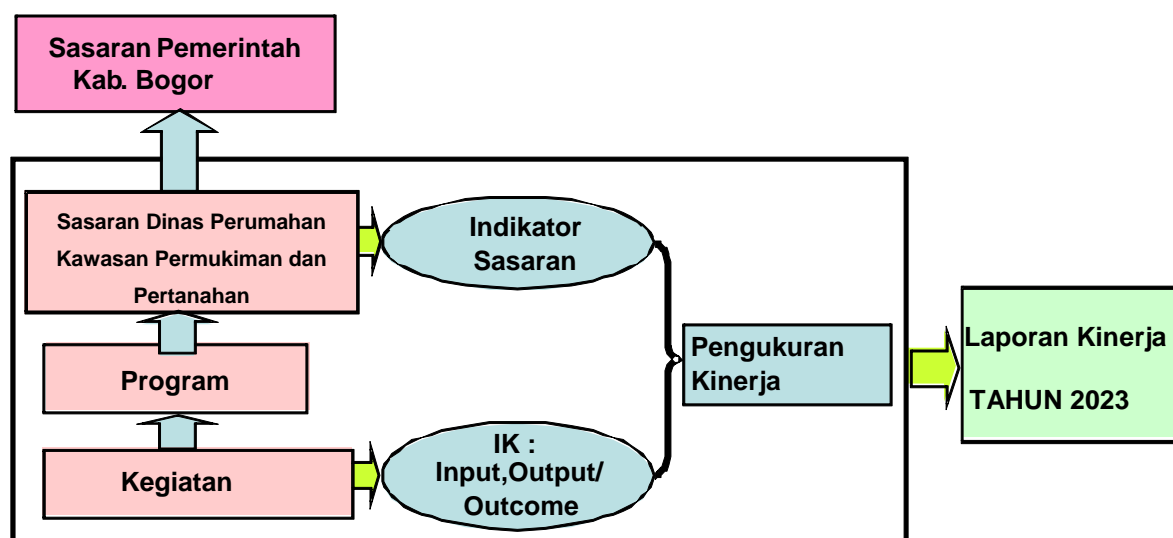
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan

penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023, disajikan dalam **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor selama tahun 2023 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada perubahan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Uraian ini tercantum dalam

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

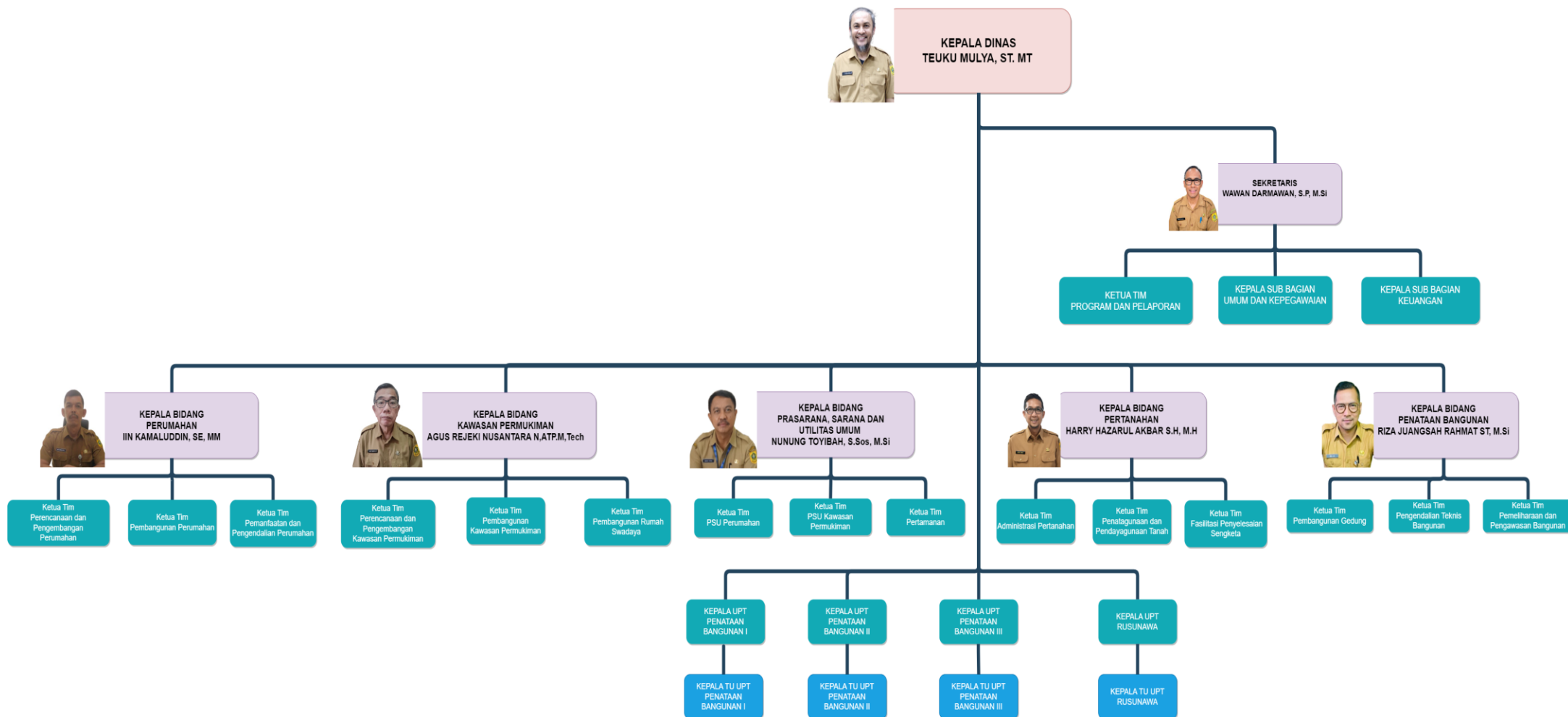
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan; dan
 - c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Koordinator Pembangunan Rumah Swadaya.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Koordinator Pertamanan.
6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :

- a. Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Teknis Bangunan.
7. Bidang Pertanahan, membawahkan :
- a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.
8. UPT
- a. UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong;
 - b. UPT Pengawas Bangunan II Wilayah Ciawi;
 - c. UPT Pengawas Bangunan III Wilayah Leuwiliang; dan
 - d. UPT Rumah Susun Umum Sewa Kelas A.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR



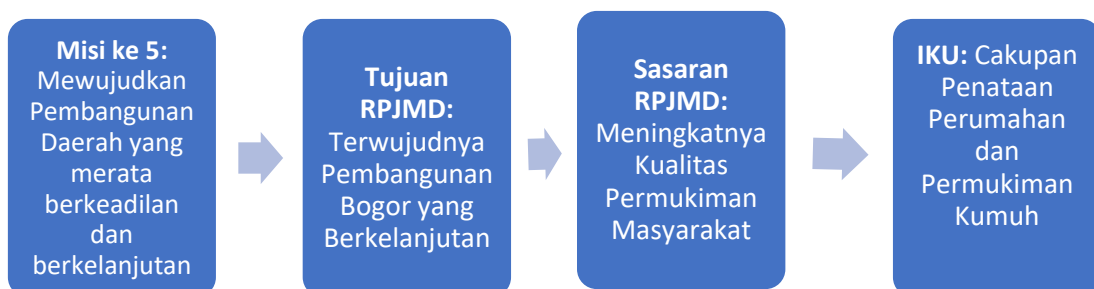
BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2019–2023 dan memenuhi Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 menetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**. Keberhasilan visi tersebut dapat ditunjukkan dengan pencapaian beberapa factor yang menjadi unggulan dan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembandung dan waktu pencapaian indicator.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPKPP dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:





Gambar 3.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni
2. Persentase Luas Kawasan Kumuh
3. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
4. Tingkat pelayanan unsur pertanahan

Adapun Sasaran, indikator dan target Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2019-2023, yaitu :

Tabel 2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

| Sasaran | Indikator | Target | | | | |
|--|---|--------|--------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tahun 2019-2020 | | | | | | |
| Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni | Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh | 13.45% | 28.15% | - | - | - |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 94.15% | 94.79% | - | - | - |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 0.067% | 0.055% | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------|--------|--------|
| Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 60% | 65% | - | - | - |
| | Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/ lahan bersertifikat | 75% | 78% | - | - | - |
| Tahun 2021-2023 | | | | | | |
| | Persentase permukiman layak | - | - | 99.72% | 99.86% | 100% |
| Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | - | - | 18.42% | 27.09% | 35.84% |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | - | - | 0.13% | 0.07% | 0 |
| Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | - | - | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | - | - | 54.02% | 77.01% | 100% |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023, yaitu :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023

| Sasaran | Indikator | Target |
|---|--|---------|
| Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | 35,84% |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | 0,00% |
| Tertatanya bangunan gedung | Persentase | 100,00% |

| | | |
|--|--|------|
| dan lingkungannya | penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | |
| Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023, diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pengukuran capaian indikator kinerja DPKPP Kabupaten Bogor 2023 didasarkan pada rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja terkait Persentase luas permukiman kumuh dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi kumuh (akumulasi)}}{\text{target penanganan kumuh}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

| No | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|----|-----------------|------------------|
| 1 | >100 | Sangat Baik |
| 2 | 85 s/d 100 | Baik Sekali |
| 3 | 70 s/d <85 | Baik |
| 4 | 55 s/d < 70 | Cukup |
| 5 | < 55 | Kurang |

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | 35,84% | 31.27% | 87.24% |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | 0,00% | 0.021% | 93.12% |
| Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | 100% | 88.96% | 88.96% |

B. Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2019-2023 melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan;
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;
3. Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya;
4. Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan.

Sasaran strategis tersebut merupakan upaya mencapai tujuan :

1. Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
2. Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat dijabarkan pada tabel dan uraian setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang pertama ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sasaran 1: Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

| Indikator | 2023 | | | Capaian 2023 thdp 2023 |
|--|--------|-----------|---------|------------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase penyediaan rumah layak huni | 35.84% | 31.27% | 87.24% | 87.24% |

Berdasarkan target indikator kinerja pada perubahan Renstra tahun 2023 sebesar 35.84%, persentase penyediaan rumah layak huni, sesuai realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 31.27%, pencapaian kinerja adalah 87.24% (Tinggi). Kontribusi pencapaian kinerja ini melalui Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang dialokasikan oleh APBD sebanyak 1193 Unit, dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 643 unit, dan dibangun APBD Provinsi sebanyak 1200 unit sehingga total pembangunan rumah terdampak bencana sebanyak 3039 unit.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator persentase permukiman layak huni tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama Perbaikan RTLH, BSPS dan Banprov;
2. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan;
3. Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan;

- **Permasalahan dan Hambatan**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini pun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi terutama :

1. Belum optimalnya dukungan stakeholder untuk pemenuhan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat
2. Adanya keterbatasan lahan di beberapa desa untuk pembangunan Hunian Tetap
3. Pembangunan Hunian Tetap terkendala akses distribusi bahan dan panel pre-cast
4. Beberapa desa terkendala jaringan listrik
5. Belum adanya Sarana Air Bersih pada lahan Huntap yang telah terbangun
6. Adanya keterbatasan anggaran untuk melanjutkan infrastruktur PSU huntap yg sudah terbangun
7. Faktor cuaca yang menghambat kegiatan pembangunan Huntap
8. Masyarakat mengusulkan dobel bantuan RTLH yaitu ke provinsi dan APBD sehingga setelah dilakukan verifikasi terdapat 7 nama penerima yang tidak diserap di APBD dikarenakan sudah mendapat bantuan dari provinsi.

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan instansi lain/pihak swasta yg bisa diajukan hak penggunaan lahannya untuk lokasi relokasi korban bencana alam (Huntap).
2. Pada lahan yang terbatas maka pembangunan Huntap dilakukan dengan tipe deret sehingga penggunaan lahan bisa lebih efisien.
3. Untuk kendala akses jalan dan cuaca dilakukan penambahan armada angkut yg lebih kecil dan tenaga kerja yang lebih banyak pada saat cuaca mendukung (Huntap)
4. Untuk kendala listrik dilakukan koordinasi dengan pihak PLN agar dapat mempercepat pemasangan tiang untuk kawasan instalansi baru (Huntap)
5. Untuk Sarana Air Bersih (SAB) Dan infrastruktur dilakukan upaya koordinasi Dan kerjasama dengan instansi lain terkait (Huntap)
6. Untuk kendala akses jalan n cuaca dilakukan penambahan armada angkut yg lebih kecil Dan tenaga kerja Yang lebih Banyak pada saat cuaca mendukung
7. Melakukan verifikasi data eksisting penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
8. Menyusun data calon penerima calon lokasi (CPCL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan hasil verifikasi.
9. Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif mengenai perkembangan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilapangan dengan Tim Koordinasi, Tim Fasilitator Lapangan, Mitra Kecamatan dan Desa.

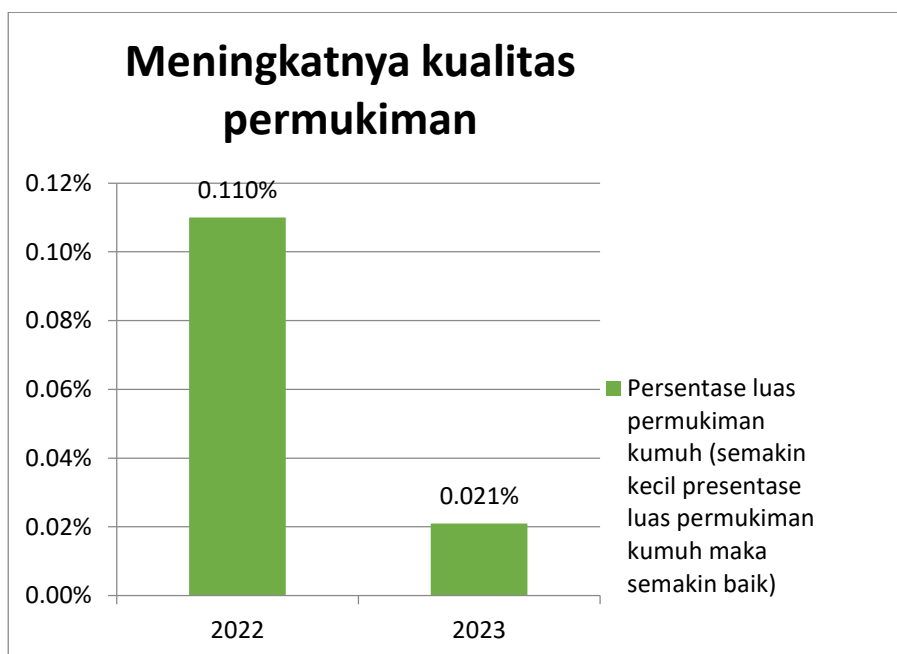
2. Meningkatnya kualitas permukiman

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang kedua ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Luas Permukiman Kumuh

| Indikator | 2023 | | | Capaian 2023 thdp 2023 |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase luas permukiman kumuh | 0.00% | 0.021% | 93.12% | 93.12% |

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 0%, berkurangnya kawasan kumuh sesuai realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 0.021% Realisasi pencapaian kinerja adalah 93.12%. Kontribusi Pencapaian kinerja ini melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang dialokasikan oleh APBD Kabupaten Bogor dan bantuan dari APBN berupa program Kota Tanpa kumuh (Kotaku).



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator persentase luas permukiman kumuh tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor pendukung keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
3. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman.

- **Permasalahan dan Hambatan**

Namun dalam pelaksanaan sasaran berkurangnya luas permukiman kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Perlu dukungan terkait anggaran yang sesuai dengan target penuntasan kumuh.
2. Belum tersosialisasinya penginputan usulan kegiatan kedalam SIPD oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara menyeluruh.
3. Kurangnya dukungan stakeholder lain dalam penuntasan kawasan kumuh.
4. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
5. Kondisi geografis dan budaya di wilayah permukiman yang berbeda dapat mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kumuh;
6. Masih kurang dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran berkurangnya luas permukiman kumuh adalah :

1. Koordinasi terkait penambahan anggaran guna percepatan penuntasan kumu sesuai dengan target Bupati.
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memfasilitasi penerima bantuan dalam hal ini BKM untuk kelancaran mengakses SIPD yang sesuai dengan kamus hibah.
3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait agar rencana kegiatan yang dilakukan sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, guna tercapainya penuntasan kumuh.
4. Akan dibentuk SK Tim Koordinasi Penanganan Kumuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi stakeholder dalam penanganan kumuh.

3. Tertatanya Bangunan Gedung Dan Lingkungan

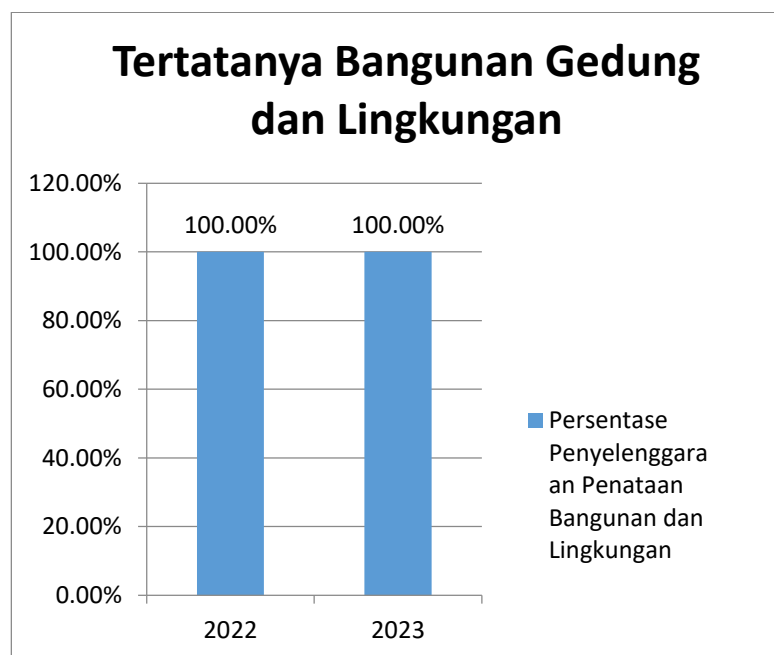
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang ketiga ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

| Indikator | 2023 | | | Capaian 2023 thdp 2023 |
|---|--------|-----------|---------|---------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | |
| Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | 100% | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 100%, persentase penyelenggaraan penataan bangunan realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 100% Realisasi pencapaian kinerja adalah 100% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan. tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan yang jelas dalam pembangunan gedung sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Koordinasi yang terjalin baik dengan stakeholder yang terkait kegiatannya .

- **Permasalahan dan Hambatan**

Namun dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung tersebut ada penambahan waktu kerja yang diakibatkan manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik dari pelaksana jasa konstruksi;

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
2. Berkoordinasi dengan konsultan pengawas agar pihak pelaksana jasa konstruksi untuk segera menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja

4. Meningkatnya Tertib Tata Kelola Pertanahan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang keempat ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan

| Indikator | 2023 | | | Capaian 2023 thdp 2023 |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | |
| Tingkat pelayanan unsur pertanahan | 100% | 88.96% | 88.96% | 88.96% |

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 100%, tingkat pelayanan unsur pertanahan realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 88.96% Realisasi pencapaian kinerja adalah 88.96% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bogor Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu (satu) daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan. tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Koordinasi yang baik diinternal dan stakeholder lain dalam fasilitasi penyelesaian sengketa.
- b. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka pensertipikatan aset pmda

- **Permasalahan dan Hambatan**

Dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu

1. Masih banyak aset tanah Pemerintah Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah;
2. Dalam penerbitan sertipikat kewenangan ada pada kantor BPN.
3. Masih banyaknya tanah Pemerintah Daerah yang belum teridentifikasi.

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Menanggapi dengan cepat pengaduan sengketa pertanahan.
2. Terus dilakukan identifikasi, pengukuran pemetaan dan penegasan batas tanah yang menjadi aset pemda
3. Koordinasi dan membuat komitmen dengan BPN agar bidang tanah/lahan milik pemerintah yang didaftarkan untuk disegerakan proses pensertifikatannya.
4. Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah (SIManTan).

- **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2023**

Dalam mendukung pencapaian target Pancakarsa Tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam Karsa Membangun dan Karsa Berkeadaban

- ✓ Karsa Membangun yaitu meliputi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Rawayan, Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Bedah Kampung, dan Pembangunan Taman di Kabupaten Bogor
- ✓ Karsa Berkeadaban yaitu meliputi Revitalsasi Islamic Center (Pusdai)

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa pada tahun 2023 pencapaian *Karsa Membangun* melalui Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung dan Sub Kegiatan Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung, Program Kawasan permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan Program Pengembangan Permukiman Kegiatan penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

Pemanfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan Jembatan Gantung/Rawayan pada tahun 2023 dari target 16 unit terealisasi sebanyak 15 unit atau sebesar 93,75%. Target fisik tidak tercapai dikarenakan terdapat jembatan rawayan yang terkena bencana banjir yaitu di Kecamatan Jasinga, Desa Kalong Sawah dengan panjang jembatan 65 m sehingga ada dua titik lokasi yang diganti untuk mengakomodir bencana yaitu di Kecamatan Jasinga, Desa Pangaur, dengan panjang jembatan 36 m dan Kecamatan Sukamakmur, Desa Sirnajaya, dengan panjang jembatan 28 m sedangkan Rehabilitasi Jembatan Gantung/Rawayan pada tahun 2023 dari target 14 unit terealisasi sebanyak 14 unit atau sebesar 100%.

Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Bedah Kampung dengan target 7 lokasi terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100%, Pembangunan Taman dengan target 7 lokasi terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100%

Pencapaian *Karsa berkeadaban* melalui Program Penataan Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yaitu Revitalsasi Islamic Center (Pusdai) pada tahun 2023 dengan target 1 gedung terealisasi sebanyak 1 gedung atau sebesar 100%

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa tahun 2022 dan 2023 dapat dijabarkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2022 dan 2023

| N O | KARSA BOGOR | PD PENGAMPU | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | SUB SUB KEGIATAN | 2022 | | | 2023 | | |
|-------------------------|---|--|--------------------------|---|--|------------------------------|--------|-----------|---------|--------|------------|---------|
| | | | | | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Karsa Bogor Membangun | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revitalisasi jembatan rawayan/ jembatan gantung | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Pembangunan Jembatan Gantung | Pembangunan Jembatan Rawayan | 30 | 30 | 100% | 16 | 15 | 93.75 % |
| | | | Penyelenggaraan Jalan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung | Pembangunan Jembatan Rawayan | - | - | - | 14 | 14 | 100 % |
| 2 | Peningkatan Kualitas Desa melalui Bedah Kampung | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Kawasan permukiman | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Bedah Kampung | 7 | 7 | 100 % | 7 | 7 6 | 100 % |
| 3 | Penyediaan ruang terbuka publik | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pengembangan Permukiman | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Taman | 4 | 4 | 100 % | 7 | 7 | 100 % |
| Karsa Bogor Berkeadaban | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revitalisasi Islamic Center | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Penataan Bangunan Gedung | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Gedung Pusdai | 2 | 2 | 100 % | 1 | 1 | 100 % |

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dari program utama dan program pendukung adalah sebesar Rp. 355.138.809.581.- atau 96.37 % dari pagu sebesar Rp. 368.515.517.686.-. Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2023 sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 304.091.250.665.- terealisasi sebesar Rp. 298.431.002.041.- atau terserap sebesar 98.18%, dengan sisa anggaran sebesar 5.660.248.624. - atau sebesar 1.82%
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 64.424.267.021,00.- terealisasi sebesar Rp. 56.390.642.540,00.- atau terserap sebesar 87.53%, dengan sisa anggaran sebesar 8.033.624.481.- atau sebesar 12.47%

Berdasarkan hasil dari pengukutan kinerja kegiatan dapat dilakukan ealuasi pencapaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas kinerja seperti tersebut diatas, dan target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran DPKPP di Tahun 2023

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------|---|----------------|---|-------|
| | | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| Program Pengembangan Permukiman | Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | 56.25 | 113,898,420,119 | 50 | % | 19,732,073,045 | 50 | 19,079,363,886 | 100 | 96.69 |
| Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | 170 | 113,898,420,119 | 14 | Lokasi | 19,732,073,045 | 14 | 19,079,363,886 | 100 | 96.69 |
| Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jembatan Rawayan yang dibangun | 63 | 61,863,563,950 | | | | | | | |
| | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | Sistem Jaringan | 7,820,984,743 | 1 | 7,552,998,259 | 100 | 96.57 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| | Jumlah TPU yang dibangun fasilitasnya | 11 | - | 9 | | | 9 | | 100 | |
| | Jumlah TPU yang terpelihara | 17 | - | 1 | | | 1 | | 100 | |
| | Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun | 1 | - | 1 | | | 1 | | 100 | |
| Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah taman kota dan taman jalur jalan yang terbangun dan/atau tertata | 14 | 52,034,856,169 | 7 | Lokasi | | 7 | | 100 | |
| | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | Sistem Jaringan | 11,911,088,302 | 1 | 11,526,365,627 | 100 | 96.77 |
| | Jumlah taman yang terjaga dan terpelihara | 64 | | 36 | Lokasi | | 36 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan gedung yang tertata | 100 | 106,804,906,132 | 100 | % | 25,690,643,063 | 100 | 23,468,309,905 | 100 | 91.35 |
| Penyelenggaraan Bangunan Gedung di tilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan gedung yang dibangun | 9 | 106,804,906,132 | 4 | Gedung | 25,690,643,063 | 4 | 23,468,309,905 | 100 | 91.35 |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | 1,850 | Dokumen | 2,362,778,799 | 1,952 | 2,317,802,458 | 105.51 | 98.10 |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT I | | | 400 | Dokumen | 202,840,748 | 663 | 196,281,998 | 165.75 | 96.77 |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT II | | | 200 | Dokumen | 148,388,590 | 293 | 141,440,140 | 146.50 | 95.32 |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT III | | | 165 | Dokumen | 255,651,639 | 223 | 254,759,546 | 135.15 | 99.65 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|----------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung yang dibangun | 9 | 106,804,906,132 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 22,720,983,287 | 1 | 20,558,025,763 | 100 | 90.48 |
| | Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun | 14 | - | 9 | | | 9 | | 100 | |
| | Jumlah dokumen pengawasan kegiatan konstruksi bangunan gedung | 11 | - | 6 | | | 6 | | 100 | |
| | Jumlah Pagar yang terbangun | 1 | - | 1 | | | 1 | | 100 | |
| | Jumlah Gedung yang direhabilitasi | 3 | - | 2 | | | 2 | | 100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya | Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata | 93.91 | 23,264,801,803 | 100 | % | 28,164,631,168 | 100 | 22,054,695,920 | 100 | 78.31 |
| | | | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata | 100 | 23,264,801,803 | 100 | % | 28,164,631,168 | 100 | 22,054,695,920 | 100 | 78.31 |
| Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan yang tersusun | 5 | 22,688,706,395 | | | | | | | |
| | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Paritisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | 4 | Kawasan | 27,505,166,011 | 4 | 21,403,665,027 | 100.00 | 77.82 |
| | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Paritisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT I | | | 1 | Kawasan | 236,707,506 | 1 | 233,416,206 | 100.00 | 98.61 |
| | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Paritisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT II | | | 1 | Kawasan | 210,201,448 | 1 | 209,157,248 | 100.00 | 99.50 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|---|--------------------------------------|-------------|--|---------|-------------|---|-------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Paritisaat, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya UPT III | | | 1 | Kawasan | 212,556,203 | 1 | 208,457,439 | 100.00 | 98.07 |
| | Jumlah jalur yang tertata | 7 | - | 2 | | | 2 | | 100 | |
| | Jumlah bangunan yang non perumahan yang diatasi dan dikendalikan | 525 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Tugu Batas yang Terbangun | 12 | - | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen laporan Pendataan objek media luar dan dalam ruang reklame di Kabupaten Bogor | 40 | - | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen laporan pengawasan dan pengendalian objek media luar dan dalam ruang reklame di Kabupaten Bogor | 40 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Panggung Reklame Pemerintah yang terpelihara | 24 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Papan Pengumuman yang tersedia | 33 | - | 40 | | | 40 | | 100 | |
| | Jumlah Terbangunnya Lettersign | 21 | - | | | | | | | |
| | Jumlah tertatanya reklame di jalur strategis | 3 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Panggung Banner Sosialisasi Uk. 8 M x 16 M | 0 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Revitalisasi Panggung Sosialisasi | 1 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Pembangunan Sistem Informasi | 1 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Videotron yang terbangun | 1 | | | | | | | | |
| | Jumlah Kawasan yang tertata | 2 | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan ditilayah UPT I | 12 | 175,126,275 | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan ditilayah UPT II | 12 | 154,062,462 | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian bangunan ditilayah UPT III | 12 | 246,906,671 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|--|----------|-----------------|---|-----------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | | | 1 | Kegiatan | 18,415,367,458 | 1 | 18,353,795,279 | 100 | 100 |
| Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Tersedianya Akses Jembatan Yang Lebih Baik | | | 16 | Unit | 18,415,367,458 | 15 | 18,353,795,279 | 93.75 | 99.67 |
| Pembangunan Jembatan Gantung | Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun | | | 16 | Unit | 15,234,051,385 | 15 | 15,205,424,400 | 93.75 | 99.81 |
| Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung | Jumlah Jembatan Gantung yang Diganti/Direhabilitasi | | | 14 | Unit | 3,181,316,073 | 14 | 3,148,370,879 | 100.00 | 98.96 |
| | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Perumahan | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana | 57.34 | 48,591,202,331 | 100 | % | 185,340,609,273 | 114.14 | 184,855,528,171 | 114.14 | 99.74 |
| | | | | | | | | | | |
| Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana | 3 | 763,496,717 | 2 | Dokumen | 211,388,790 | 2 | 210,904,840 | 100.00 | 99.77 |
| Identifikasi Perumahan di Lokasi Ratan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Sebaran perumahan di lokasi ratan bencana | 3 | 433,129,522 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Ratan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 147,901,132 | 1 | 147,693,232 | 100 | 99.86 |
| | Jumlah bangunan rumah tinggal dilokasi ratan bencana | 7 | | | | | | | | |
| Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Data tingkat kerusakan rumah akibat bencana | 11 | 147,325,545 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | | | 1 | Dokumen | 63,487,658 | 1 | 63,211,608 | 100 | 99.57 |
| Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Data lahan potensial calon relokasi bencana | 1 | 183,041,650 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|--|--------------------------------------|----------------|--|------------|-----------------|---|-----------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Kepala Keluarga Calon Penghuni Korban Bencana | 1219 | 74,735,000 | 937 | KK | 26,913,750 | 400 | 24,981,100 | 42.69 | 92.82 |
| Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelatan Tanggap Bencana | Jumlah Kepala Keluarga calon penghuni Huntap | 1219 | 74,735,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Orang/Sukarelatan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | 400 | Orang | 26,913,750 | 400 | 24,981,100 | 100 | 92.82 |
| | terealisasi persiapannya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana | 57.34 | 46,019,109,386 | 100 | % | 184,106,915,421 | 114.14 | 183,713,668,550 | 114.14 | 99.79 |
| Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi | 292 | 3,197,610,300 | 260 | Unit Rumah | 3,499,316,918 | 246 | 3,461,719,108 | 94.62 | 98.93 |
| Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 337,393,200 | 1 | 331,981,000.00 | 100.00 | 98.40 |
| Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana | 17 | 3,016,228,034 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) | 2 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen UPL/UKL | 1 | - | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|---|--------------------------------------|----------------|--|------------|-----------------|---|-----------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah laporan Pendampingan P3BK | 0 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Lokasi Landclearing Hutan Cigudeg dan Leutisadeng | 1 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Penyusunan Sistem Informasi Perumahan | 1 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Hutan Leutisadeng yang teraliri listrik | 205 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Seta Lahan Hutan | 1 | - | | | | | | | |
| Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah hunian tetap yang terbangun bagi korban bencana | 187 | 39,805,271,052 | | | | | | | |
| | Jumlah Rumah Khusus bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | 2500 | Unit Rumah | 180,270,205,303 | 2,500 | 179,919,968,442 | 100.00 | 99.81 |
| | Jumlah PSU Hutan yang terbangun | 3 | - | | | | | | | |
| | Lokasi Land Clearing untuk 250 Unit | 5 | - | | | | | | | |
| | Seta Hutan | 1 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Instalasi Listrik yang terpasang | 358 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Perumahan | 1 | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pengawasan Konstruksi Yang Tersusun | 9 | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) yang tersusun | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 557,930,065 | 1 | 469,908,400 | 100 | 84.22 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1 | Laporan | 72,911,190 | 1 | 67,361,500 | 100 | 92.39 |
| Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 485,018,875 | 1 | 402,546,900 | 100 | 83.00 |
| | | | | | | | | | | |
| Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah rusunawa yang tertib pengelolaannya | 1 | 944,688,455 | 1 | Lokasi | 262,556,840 | 1 | 261,187,049 | 100 | 99.48 |
| Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Jumlah unit rusunata yang dikelola | 299 | 639,884,684 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | 2 | Laporan | 262,556,840 | 2 | 261,187,049 | 100 | 99.48 |
| Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Jumlah Rumah Susun Yang Ditata | 3 | 304,803,771 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | Dokumen | 0 | | | | |
| | Jumlah dokumen Study Kelayakan Pembangunan Rusunata | 1 | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen UKL-UPL | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya | 736 | 789,172,754 | | Dokumen | 174,904,407 | | 174,878,232 | | 99.99 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah dokumen data identifikasi perumahan | 3 | 271,501,233 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---|----------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | 2 | Laporan | 174,904,407 | 2 | 174,878,232 | 100 | 99.99 |
| | Data Identifikasi Perumahan | 19 | - | | | | | | | |
| | Pengendalian Perumahan | 2 | - | | | | | | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen Surat Pertimbangan Teknis yang dikaji rencana teknisnya | 1768 | 517,671,521 | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen pengatatan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan perumahan | 3 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | Jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung | 1768 | 789,172,754 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) | Jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung | 1,768 | 517,671,521 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi | 59.61 | 58,436,683,996 | 33.80 | % | 28,082,344,740 | 24.84 | 27,873,474,228 | 73.49 | 99.26 |
| | Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 63.32 | - | 100 | % | | 29.80 | | 93.12 | |
| | | | | | | | | | | |
| Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani | 97.76 | 2,791,493,783 | 154.4 | Ha | 130,022,976 | 46.01 | 130,000,666 | 93.12 | 99.98 |
| Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | 1 | Dokumen | 28,656,910 | 1 | 28,634,600 | 100 | 99.92 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 43.2 | 1,994,345,695 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | 1 | Laporan | 101,366,066 | 1 | 101,366,066 | 100 | 100.00 |
| Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | 4 | 797,148,088 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi | 3,196 | 52,015,381,905 | 1200 | unit | 27,952,321,764 | 1,193 | 27,743,473,562 | 99.42 | 99.25 |
| Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh | | | 1 | Dokumen | 310,986,032 | 1 | 263,188,222 | 100 | 84.63 |
| Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 2031 | 49,516,609,811 | 1200 | Unit Rumah | 19,104,443,565 | 1,193 | 18,953,237,335 | 99.42 | 99.21 |
| Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Lokasi yang tertangani infrastruktur sosial ekonomi tilayahnya | | | 7 | Lokasi | 8,406,451,797 | 7 | 8,398,928,155 | 100 | 99.91 |
| | Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar | | | 33.28 | Ha | | 33.28 | | 100.00 | |
| Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | | | 1 | Dokumen | 130,440,370 | 1 | 128,119,850 | 100 | 98.22 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|---------------|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Lokasi yang tertangani infrastruktur sosial ekonomi tilayahnya | 48 | 2,498,772,094 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman kumuh | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji | 3421.00 | 3,629,808,308 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah bangunan non perumahan yang diatasi dan dikendalikan | 257.00 | 308,441,750 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT I) | Jumlah dokumen pengaduan dan pengendalian bangunan di tilayah UPT I | 12.00 | 148,292,823 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT II) | Jumlah dokumen pengatasan dan pengendalian di tilayah UPT II | 12.00 | 129,641,600 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT III) | Jumlah Dokumen Laporan Pengatasan Bangunan Di tilayah UPT III | 12.00 | 191,741,874 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji | 1108.00 | 1,907,261,189 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah RKB/SLF yang dikeluarkan | 396.00 | - | | | | | | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT I) | Jumlah gambar situasi tilayah UPT I yang dikeluarkan | 1268.00 | 299,681,011 | | | | | | | |
| | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 ditilayah UPT I yang dikaji | 18.00 | - | | | | | | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT II) | Jumlah gambar situasi tilayah UPT II yang dikeluarkan | 502.00 | 237,843,172 | | | | | | | |
| | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 ditilayah UPT II yang dikaji | 13.00 | - | | | | | | | |
| Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT III) | Jumlah gambar situasi tilayah UPT III yang dikeluarkan | 561.00 | 406,904,889 | | | | | | | |
| | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luasan sampai dengan 300 m2 ditilayah UPT III yang dikaji | 6.00 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda | 128.41 | 1,153,834,928 | 81.10 | % | 17,354,055,528 | 79.30 | 16,572,967,063 | 97.78 | 95.50 |
| Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah PSU Perumahan yang telah menjadi aset pemda | 40 | 1,153,834,928 | 45 | Perumahan | 17,354,055,528 | 44.00 | 16,572,967,063 | 97.78 | 95.50 |
| Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | Dokumen identifikasi dan verifikasi PSU Perumahan | 5 | 590,834,400 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | 1 | Dokumen | 285,685,493 | 1 | 282,358,875 | 100 | 98.84 |
| | Jumlah PSU perumahan yang terlantar dan terdata | 10 | | | | | | | | |
| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah pemulihan aset PSU yang terlantar | 35 | 406,462,628 | | | | | | | |
| | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | | | 5 | Lokasi | 16,596,058,563 | 4 | 15,863,870,740 | 80 | 95.59 |
| | Jumlah Penambahan Calon Aset Pemda dari PSU Perumahan | 40 | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah perumahan yang terpantau proses pembangunan PSU nya | 115 | 156,537,900 | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | 1 | Laporan | 94,645,897 | 1 | 82,517,950 | 100 | 87.19 |
| Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan | | | 40 | Dokumen | 377,665,575 | 36 | 344,219,498 | 90.00 | 91.14 |
| | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan | | | | | | | | | | |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi | 68.00 | 1,849,325,079 | 100 | % | 764,590,024 | 100 | 525,765,500 | 100 | 68.76 |
| Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sengketa tanah yang terfasilitasi | 12 | 1,849,325,079 | 10 | Sengketa | 764,590,024 | 10 | 525,765,500 | 100 | 68.76 |
| Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data hasil mediasi Sengketa Tanah | 12 | 1,849,325,079 | | | | | | | |
| | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 500 | - | 1 | Dokumen | 764,590,024 | 1 | 525,765,500 | 100 | 68.76 |
| | | | | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|----------------|--|---------|---------------|---|---------------|---|-------|
| Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente | Persentase lahan kosong yang didistribusi | 0 | - | | % | | | | | |
| Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lahan kosong yang didistribusi | - | - | | % | | | | | |
| Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah lokasi inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah | - | - | | | | | | | |
| | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | - | | Dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase tanah kosong yang teridentifikasi | 66.66 | 281,993,750 | 100 | % | 302,281,800 | 100 | 301,653,000 | 100 | 99.79 |
| Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | Jumlah tanah kosong yang telah teridentifikasi | 15 | 281,993,750 | 15 | Bidang | 302,281,800 | 15 | 301,653,000 | 100 | 99.79 |
| Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tanah Kosong | 2 | 281,993,750 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. | | | 1 | Laporan | 302,281,800 | 1 | 301,653,000 | 100 | 99.79 |
| | | | | | | | | | | |
| Program Penatagunaan Tanah | Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum | 75.95 | 12,547,809,119 | 43.51 | % | 7,545,104,227 | 43.51 | 7,356,586,283 | 100 | 97.50 |
| Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | 75.95 | 12,547,809,119 | 45.98 | % | 7,545,104,227 | 45.98 | 7,356,586,283 | 100 | 97.50 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN I | 169,649 | 7,998,423,047 | 11,747 | Ha | | 11,747 | | 100 | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|--|---------|----------------|---|----------------|---|-------|
| | Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN II | | | 5,798 | Ha | | 5,798 | | 100 | |
| | Jumlah Target SHAT (BPN I) | 90,000 | | 42,000 | Bidang | | 42,000 | | 100 | |
| | Jumlah Target SHAT (BPN II) | | | 13,468 | Bidang | | 13,468 | | 100 | |
| | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | 1 | Laporan | 5,642,242,597 | 1 | 5,556,263,006 | 100 | 98.48 |
| Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Ketenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah | 1 | 77,689,000 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | 2,924 | 4,471,697,072 | | | | | | | |
| | Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | | | 600 | Bidang | | 707 | | 117.83 | |
| | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Ketenangan Kabupaten/Kota | | | 1 | Dokumen | 1,902,861,630 | 1 | 1,800,323,277 | 100 | 94.61 |
| | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 197 | 71,614,864,607 | 100 | % | 37,123,817,360 | 93.03 | 34,696,670,346 | 93.03 | 93.46 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | 39 | 1,366,515,733 | 15 | Dokumen | 822,212,300 | 15 | 816,912,137 | 100.00 | 99.36 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 | 450,491,379 | 8 | Dokumen | 293,389,666 | 8 | 289,525,566 | 100.00 | 98.68 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 36,549,350 | 1 | Dokumen | 36,913,700 | 1 | 35,975,200 | 100.00 | 97.46 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--|----------------|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4 | 45,767,400 | 1 | Dokumen | 35,741,850 | 1 | 35,656,600 | 100.00 | 99.76 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | 36,062,100 | 2 | Dokumen | 29,513,850 | 2 | 29,475,850 | 100.00 | 99.87 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 14 | 32,791,000 | 2 | Dokumen | 31,183,650 | 2 | 31,106,500 | 100.00 | 99.75 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 | 38,746,000 | 4 | Laporan | 28,444,900 | 4 | 28,431,250 | 100.00 | 99.95 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | 726,108,504 | 4 | Laporan | 367,024,684 | 4 | 366,741,171 | 100.00 | 99.92 |
| | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah | 13 | 47,795,621,873 | 7 | Dokumen | 25,222,956,068 | 7 | 23,596,507,790 | 100.00 | 93.55 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan PNS Perangkat Daerah yang terbayarkan | 26 | 47,399,284,781 | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 171 | | 163 | Orang/bulan | 24,970,477,068 | 150 | 23,352,657,416 | 92.02 | 93.52 |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan | 2 | 302,771,792 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 12 | Dokumen | 203,235,374 | 12 | 196,184,424 | 100.00 | 96.53 |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Laporan akuntansi SKPD | 2 | 10,804,350 | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 2 | Dokumen | 10,254,800 | 2 | 10,169,750 | 100 | 99.17 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD | 2 | 22,673,450 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|---------------|--|---------|-------------|---|-------------|---|-------|
| | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 1 | Laporan | 20,684,902 | 1 | 20,535,000 | 100 | 99.28 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1 | 4,751,500 | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tritulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/tritulanan/semesteran | 19 | 39,351,250 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Tritulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD | | | 2 | Laporan | 18,303,924 | 2 | 16,961,200 | 100 | 92.66 |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan analisis prognosis realisasi anggaran | 2 | 15,984,750 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dikelola | 10 | 116,619,481 | 6 | Dokumen | 69,239,737 | 6 | 69,129,166 | 100 | 99.84 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah barang milik daerah yang dikelola | 10 | 116,619,481 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 4 | Laporan | 69,239,737 | 4 | 69,129,166 | 100 | 99.84 |
| | | | | | | | | | | |
| Administrasi Pendapatan Daerah Ketenangan Perangkat Daerah | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 1 | Laporan | 68,556,150 | 1 | 67,583,550 | 100 | 98.58 |
| Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 1 | Dokumen | 68,556,150 | 1 | 67,583,550 | 100.00 | 98.58 |
| | | | | | | | | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang terlayani administrasinya | 21 | 1,239,305,072 | 17 | Layanan | 989,362,957 | 17 | 909,458,148 | 100 | 91.92 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian | 24 | 526,588,772 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|--|---------|---------------|---|---------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 32 | | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 10 | Dokumen | 769,381,276 | 10 | 731,881,988 | 100 | 95.13 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan | 25 | 173,400,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 16 | Orang | 148,499,877 | 16 | 129,308,760 | 100.00 | 87.08 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 66 | 132,578,800 | | | | | | | |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 60 | Orang | 71,481,804 | 60 | 48,267,400 | 100 | 67.52 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut (Tenaga Rekrutmen, Satpam, OB) | 193 | 406,737,500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan umum perangkat daerah yang terpenuhi | 25 | 2,444,862,847 | 17 | Layanan | 2,372,563,422 | 17 | 2,108,666,132 | 100 | 88.88 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia | 52 | 70,678,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 3 | Paket | 44,976,061 | 3 | 40,929,800 | 100 | 91.00 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia | 126 | 877,083,099 | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 3 | Paket | 69,992,548 | 3 | 66,729,250 | 100 | 95.34 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga tersedia | 50 | 102,319,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 3 | Paket | 58,680,262 | 3 | 56,785,000 | 100 | 96.77 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor tersedia | 8 | 307,028,000 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|--|--|--------------------------------------|---------------|--|---------|---------------|---|---------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 4 | Paket | 161,081,000 | 4 | 158,612,500 | 100 | 98.47 |
| | Beban makanan dan minuman rapat (Snack & Makan) | 7235 | | | | | | | | |
| | Jumlah Isi Ulang Air Galon yang tersedia | 1289 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pengisian Tabung Gas yang Tersedia | 215 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran yang Tersedia | 21 | | | | | | | | |
| | Jumlah air mineral yang tersedia | 720 | | | | | | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 24 | 212,798,550 | | | | | | | |
| | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 3 | Paket | 87,804,774 | 3 | 84,186,000 | 100.00 | 95.88 |
| | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Buku Per-UU, Surat Kabar dan Majalah yang Tersedia | 4862 | 48,475,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 2 | Dokumen | 21,302,400 | 2 | 21,297,500 | 100 | 99.98 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi | 222 | 700,950,601 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 2 | Laporan | 879,857,000 | 2 | 672,066,666 | 100 | 76.38 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah petugas dan dokumen penataan arsip dinamis yang terlaksana | 5 | 125,530,597 | | | | | | | |
| | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | 1 | Dokumen | 1,048,869,377 | 1 | 1,008,059,416 | 100 | 96.11 |
| | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia | 262 | 5,588,071,850 | 51 | Unit | 1,506,752,564 | 19 | 1,469,949,000 | 37.25 | 97.56 |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|---------------|--|---------|---------------|---|---------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 | 141,280,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | Unit | 0 | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah KendaraanDinas Operasionalatau Lapangan | 7 | 2,707,292,000 | | | | | | | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 6 | Unit | 580,147,674 | 6 | 555,869,000 | 100 | 95.82 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | 251 | 2,739,499,850 | | | | | | | |
| | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 200 | Unit | 926,604,890 | 13 | 914,080,000 | 6.50 | 98.65 |
| | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 20 | 5,205,426,179 | 17 | Layanan | 3,241,497,417 | 17 | 2,976,268,794 | 100 | 91.82 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | 24 | 17,030,000 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1 | Laporan | 15,259,437 | 1 | 15,104,000 | 100 | 98.98 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 | 1,500,195,276 | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 1 | Laporan | 1,154,958,420 | 1 | 1,025,999,437 | 100 | 88.83 |
| | Jumlah Rekening Listrik yang Dibayarkan | 24 | | | | | | | | |
| | Jumlah Rekening Telephon yang Dibayarkan | 24 | | | | | | | | |
| | Jumlah Tagihan Internet yang Dibayarkan | 24 | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan pelayanan jasa umum kantor | 24 | 3,688,200,903 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|----------------|----------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 1 | Laporan | 2,071,279,560 | 1 | 1,935,165,357 | 100 | 93.43 |
| | Jumlah Petugas Keamanan yang Dibiayai | 58 | - | | | | | | | |
| | Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai | 54 | - | | | | | | | |
| | Upah Kerja Pegawai Honorer | 27 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara | 20 | 7,858,441,572 | 17 | Layanan | 2,830,676,745 | 17 | 2,682,195,629 | 100 | 94.75 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan | 193 | 1,120,248,722 | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Dibayar Pajaknya | 69 | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 yang Dibayar Pajaknya | 25 | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6 yang Dibayar Pajaknya | 4 | | | | | | | | |
| | Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara | 98 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 | 69 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | 25 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6 | 4 | | | | | | | | |
| | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 107 | Unit | 767,600,000 | 107 | 656,235,034 | 100.00 | 85.49 |
| Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | 60 | Unit | 34,960,000 | 55 | 29,538,000 | 91.67 | 84.49 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | 8 | 225,985,250 | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%) | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|--|------|-----------------|---|-----------------|---|-------|
| | Jumlah Pemeliharaan AC | 100 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan CCTV | 1 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Komputer | 43 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Printer | 42 | | | | | | | | |
| | Jumlah Pemeliharaan Sound System | 10 | | | | | | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 148 | Unit | 168,080,000 | 148 | 164,910,000 | 100 | 98.11 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terpelihara | 10 | 6,512,207,600 | 7 | Unit | 1,860,036,745 | 7 | 1,831,512,595 | 100 | 98.47 |
| | Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang tersedia | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 438,443,841,864 | | | 368,515,517,686 | | 355,138,809,581 | | 96.37 |

Pencapaian kinerja secara keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien, hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja dan capaian realisasi dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi sebesar 94.98 dan capaian fisik rata-rata 93.83%

D. Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi yang dilakukan pada 4 (empat) Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Rincian capaian kinerja dan anggaran di Tahun 2023 sebagai berikut :

| Sasaran | Capaian Kinerja | Target | Realisasi Anggaran |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | 87.24% | 203.329.204.825 | 201.729.126.034 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | Persentase |
|----|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 187.056.235.762 | 186.157.410.594 | 898.825.168 | 99.52 |
| 2 | Belanja Modal | 16.272.969.063 | 15.571.715.440 | 701.253.623 | 95.69 |
| | <i>Jumlah</i> | <i>203.329.204.825</i> | <i>201.729.126.034</i> | | |

| Sasaran | Capaian Kinerja | Target | Realisasi Anggaran |
|--|-----------------|----------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 93.12% | 38.147.260.503 | 37.399.458.365 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | Persentase |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 31.462.351.185 | 31.017.097.778 | 445.253.407 | 98.58 |
| 2 | | 6.684.909.318 | 6.382.360.587 | 302.548.731 | 95.47 |
| | <i>Jumlah</i> | <i>38.147.260.503</i> | <i>37.399.458.365</i> | | |

| Sasaran | Capaian Kinerja | Target | Realisasi Anggaran |
|--|-----------------|----------------|--------------------|
| Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya | 100% | 53.855.334.231 | 45.336.250.587 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | Persentase |
|----|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 15.243.536.833 | 13.573.081.669 | 1.670.455.164 | 89.04 |
| 2 | Belanja Modal | 38.611.797.398 | 31.763.168.918 | 6.848.628.480 | 82.26 |
| | <i>Jumlah</i> | <i>53.855.334.231</i> | <i>45.336.250.587</i> | | |

| Sasaran | Capaian Kinerja | Target | Realisasi Anggaran |
|--|-----------------|---------------|--------------------|
| Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | 88.96% | 7.847.386.027 | 7.722.657.343 |

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | Persentase |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 1 | Belanja Operasi | 7.550.875.627 | 7.431.645.343 | 119.230.284 | 98.42 |
| 2 | Belanja Modal | 296.510.400 | 291.012.000 | 5.498.400 | 98.15 |
| | <i>Jumlah</i> | <i>7.847.386.027</i> | <i>7.722.657.343</i> | | |

Dari tabel tersebut dapat dianalisis Efisiensi sebagai berikut:

1. Efisiensi Belanja Pegawai pada Belanja Operasi berasal dari efisiensi pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa karena disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, efisiensi belanja bahan cetak, alat komputer, honorarium jasa tenaga tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja makanan minuman rapat/jamuan, dan honorarium jasa narasumber/konsultasi tenaga ahli, belanja sewa gedung dan bangunan, paket/pengiriman, tagihan listrik, jasa iklan/reklame, dan tunjangan ASN
2. Efisiensi Belanja Modal pada Belanja modal berasal dari efisiensi pembayaran honorarium pengadaan barang/jasa karena disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, belanja modal tugu/tanda batas, belanja modal komputer, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

E. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja di level Pemerintah Daerah

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Depok yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman/Disperkim terkait data realisasi kinerja tahun 2023 (*evidence* terlampir)

- **Indikator Tujuan**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok memiliki 2 indikator tujuan yaitu predikat sakip dengan sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik dan indikator rasio permukiman layak dengan sasaran meningkatnya kualitas kawasan permukiman. Target pada indikator tujuan predikat sakip yaitu 77.25 BB dengan realisasi sebesar 77.25 BB sehingga tingkat capaiannya menjadi 100%, sedangkan pada indikator tujuan rasio permukiman layak targetnya sebesar 0.9990% dengan realisasi sebesar 0.9992% dengan tingkat capaian sebesar 100.02%.

Berbeda dengan DPKPP Kabupaten Bogor yang hanya memiliki 1 indikator tujuan yaitu persentase permukiman layak dengan sasaran meningkatnya permukiman yang layak. Target pada indikator tujuan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 99.83% dan capaian sebesar 99.83%. Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tidak terdapat indikator tujuan predikat sakip.

- **Indikator Sasaran**

Pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor target indikator sasaran persentase perumahan dengan psu tertangani 57.06% dengan realisasi sebesar 57.45% sehingga capaian kinerjanya menjadi 100.68%, indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan target sebesar 10.62% realisasi sebesar 4.35% dan capaian kinerja 40.95%, indikator persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani dengan target sebesar 88.92% realisasi sebesar 90.57% dan capaian sebesar 101.85%, indikator persentase capaian cakupan layanan dinas perumahan dan permukiman target sebesar 77.25 poin realisasi sebesar 77.25 poin dengan capaian sebesar 100%, Target pada indikator Persentase bangunan pemerintah dan fasilitas pelayanan publik yang tertangani 100% dengan realisasi sebesar 96.15% sehingga capaian kinerjanya menjadi 96.15 %. Dan indikator persentase pengadaan lahan pemerintah dan kepentingan Umum yang difasilitasi dengan target 100% realisasi 88.96% dan capaian 88.96%.

Berikut adalah tabel rincian persentase capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Depok.

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|------------|------------|---------|
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan fasilitas PSU Perumahan | Persentase Perumahan dengan PSU Tertangani | 57.06% | 57.45% | 100.68% |
| Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan bagi MBR | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau | 10.62% | 4.35% | 40.95% |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman tertangani | Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani | 88.92% | 90.57% | 101.85% |
| Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman | Persentase Capaian Cakupan layanan Dinas Perumahan dan Permukiman. Nilai Sakip | 77.25 poin | 77.25 poin | 100% |
| Meningkatnya bangunan pemerintah dan fasilitas pelayanan publik | Persentase bangunan pemerintah dan fasilitas pelayanan publik yang tertangani | 100% | 96.15% | 96.15% |
| Meningkatnya pengadaan lahan pemerintah dan kepentingan umum yang difasilitasi | Persentase pengadaan lahan pemerintah dan kepentingan Umum yang difasilitasi | 100% | 88.96% | 88.96% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok memiliki 6 indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja telah terpenuhi (hanya 1 indikator dengan nilai capaian yang rendah yaitu Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau) sedangkan DPKPP Kabupaten Bogor memiliki 4 indikator sasaran yang capaian kinerjanya telah terpenuhi secara keseluruhan.

Pada Disperkim Kota Depok persentase capaian cakupan layanan dinas melalui penilaian sakip telah dimasukkan dalam capaian indikator sasaran, selain itu terdapat indikator Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau dengan sasaran meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan bagi MBR dimana pada indikator sasaran DPKPP Kabupaten Bogor tidak ada.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja DPKPP Kabupaten Bogor dan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah dicapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja seluruhnya sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor. Namun demikian, untuk tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip – prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja DPKPP tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala secara internal untuk mengejar pencapaian indikator kinerja dinas;
2. Diperlukan koordinasi dan kerja sama secara internal untuk mencapai target kinerja dinas;
3. Diperlukan dukungan sinergi dari seluruh komponen baik dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia dan masyarakat untuk pencapaian target kinerja dinas; dan
4. Memberdayakan Unit Pelaksana Teknis untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga LKIP ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tahun 2024 yang akan datang.

Cibinong, 8 Januari 2024

**Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bogor**



LAMPIRAN

Matriks Renstra 5 Tahun

Perjanjian Kinerja 2023

Hasil Apip Inspektorat

Evkin TW IV 2023

LRA 2023

Realisasi Kinerja Disperkim Kota Depok 2023

Lampiran 1. Matrik Renstra Tahun 2019-2023

| Sasaran | Indikator | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tahun 2019-2020 | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni | Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh | 13.45% | 28.15% | - | - | - | 13.75% | 23.40% | - | - | - |
| | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 94.15% | 94.79% | - | - | - | 94.15% | 94.99% | - | - | - |
| | Persentase lingkungan permukiman kumuh | 0.067% | 0.055% | - | - | - | 0.060% | 0.059% | - | - | - |
| Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | 60% | 65% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/ lahan bersertifikat | 75% | 78% | - | - | - | 75% | 62.67% | - | - | - |
| Tahun 2021-2023 | | | | | | | | | | | |
| | Persentase permukiman layak | - | - | 99.72% | 99.86% | 100% | - | - | 99.67% | 99.74 | 99.83% |
| Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | - | - | 18.42% | 27.09% | 35.84% | - | - | 18.74% | 23.39% | 31.27% |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | - | - | 0.13% | 0.07% | 0 | - | - | 0.15% | 0.11% | 0.021% |
| Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | - | - | 54.02% | 77.01% | 100% | - | - | 68.45% | 81.00% | 88.96% |



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEUKU MULYA ST, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IWAN SETIAWAN
Jabatan : BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|----------|--------|
| 1 | Terwujudnya tata kelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih dan efektif | Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Poin | B |
| 2 | Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | % | 35.84 |
| 3 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | % | 0 |
| 4 | Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | % | 100 |
| 5 | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | % | 100 |
| 6 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | % | 50 |
| 7 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani | % | 100 |
| 8 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda | % | 81.10 |
| 9 | Tertatanya penataan bangunan gedung dan lingkungan | Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata | % | 100 |
| 10 | Tertatanya penataan bangunan gedung dan lingkungan | Persentase bangunan gedung yang tertata | % | 100 |
| 11 | Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana | % | 100 |
| 12 | Terwujudnya tata kelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih dan efektif | Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | % | 100 |
| 13 | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi | % | 5 |
| 14 | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi | % | 100 |
| 15 | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum | % | 43.51 |
| 16 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Terlaksananya Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Kegiatan | 1 |

| No | Program/ Kegiatan / Sub | Anggaran | Sumber Dana |
|----|--|-----------------|-------------|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 19,732,073,045 | APBD |
| 2 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 28,284,491,590 | APBD |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 17,354,055,528 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 28,164,631,168 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 25,690,643,063 | APBD |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 185,340,609,273 | APBD |
| 7 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 37,123,816,260 | APBD |
| 8 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 824,590,024 | APBD |
| 9 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 302,281,800 | APBD |
| 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 7,485,105,327 | APBD |
| 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 18,415,367,458 | APBD |



BUPATI BOGOR.

WAN SETIAWAN





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Indah No. 1 Telp: (021) 8756565 Cibinong 16914
<https://inspektorat.bogorkab.go.id> | e-mail: inspektorat@bogorkab.go.id

Cibinong, 11 Agustus 2023

Nomor : 700.1.2/494-Itban I/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor**

Yth.
Plt. Bupati Bogor
di
CIBINONG

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor;
5. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 700/484/Kpts/Per-UU/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2023;
6. Peraturan Inspektur Nomor: 700.1.2/753/Inspektorat tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bogor Nomor: 700.1.2/1069-SP/Itban I/2023 tanggal 12 Juli 2023.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Metodologi ini merupakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

E. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Nama evalutan : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
2. Pimpinan : Ajat Rochmat Jatnika, ST, M.Si.
3. Tugas dan Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| NO | IKU | SASARAN | INDIKATOR | RUMUS | TAHUN 2022 | | |
|----|-------------------|--|---|---|------------|-----------|---------|
| | | | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
| 1 | RTLH GABUNGAN | Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | $(\text{Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi} + \text{korban bencana yang dibangun kembali} + \text{tidak layak huni yang direhabilitasi}) / (\text{Jumlah rumah terdampak bencana} + \text{rumah tidak layak huni}) \times 100$ | 27,09 | 23,39 | 86,34 |
| 2 | KUMUH | Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | $\text{Luas kawasan permukiman kumuh} / \text{luas kawasan permukiman} \times 100$ | 0,07 | 0,11 | 61,83 |
| 3 | PB DAN LINGKUNGAN | Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | $(\text{Jumlah bangunan yang dibangun} + \text{jumlah jalur strategis yang ditata}) / (\text{Jumlah target bangunan yang dibangun} + \text{jumlah target jalur strategis yang ditata}) \times 100$ | 100 | 100 | 100 |
| 4 | SENGKETA TANAH | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | $(\text{Jumlah sengketa yang diselesaikan} / \text{jumlah sengketa} \times 100 / 2) + (\text{Jumlah aset pemda yang diproses penerbitannya} / \text{Jumlah aset pemda yang belum di sertifikat} \times 100 / 2)$ | 77,01 | 81 | 105,19 |

5. Perjanjian Kinerja Perubahan

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan | Persentase penyediaan rumah layak huni | % | 27,09 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase luas permukiman kumuh | % | 0,07 |
| 3 | Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan | Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | % | 100 |
| 4 | Terwujudnya tata kelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang baik, bersih dan efektif | Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Point | B |
| 5 | Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan | Tingkat pelayanan unsur pertanahan | % | 77,01 |

6. Dana Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

| No | Uraian | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1 | Pendapatan (PAD) | 100.000.000.000 | 46.204.116.574 | 46,20% |
| 2 | Belanja Operasi | 185.773.352.700 | 178.672.698.138 | 96,18% |
| 3 | Belanja Modal | 82.853.070.862 | 76.132.372.093 | 91,89% |

F. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah dilaksanakan melalui pengukuran, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja dengan memenuhi sub komponen dan kriteria, antara lain yaitu telah memiliki dokumen/data RPJMD, Renstra Perubahan 2018-2023, RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2022, Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2022, RKA Tahun 2022, DPA Tahun 2022 dan DPA Perubahan Tahun 2022. Aktivitas dan prosedur atas Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor telah diklasifikasikan dan diikhtisarkan di dalam LAKIP Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian/nilai akuntabilitas kinerja dengan peringkat/kategori sangat baik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan Indikator tujuan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sedangkan indikator sasaran sebanyak 4 (empat) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah 86,34%; 61,83%; 100% dan 105,19% dengan kategori kinerja baik. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor terdapat 5 (lima) rekomendasi, namun baru 3 (tiga) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti.

II. Uraian Hasil Evaluasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2022 terhadap komponen, sub komponen dan kriteria pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24 atau 80% dari bobot sebesar 30 yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai | % |
|-----|--|-------|-------|-----|
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 24 | 80% |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (Keberadaan) | 6 | 4,8 | 80% |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Kualitas). | 9 | 7,2 | 80% |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (Pemanfaatan) | 15 | 12 | 80% |

Hasil penilaian Perencanaan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia;
- Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas;
- Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan (Rencana Aksi) dapat direalisasikan sesuai target setiap triwulan.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 18,9 atau 63% dari bobot sebesar 30 yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai | % |
|-----|--|-------|-------|-----|
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30 | 18,9 | 63 |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan (Keberadaan) | 6 | 3,6 | 60% |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (Kualitas) | 9 | 6,3 | 70% |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (Pemanfaatan) | 15 | 9 | 60% |

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat pedoman teknis dan pengukuran kinerja telah dilakukan, namun pada dokumen Renja/PK belum memuat informasi mengenai deskripsi, penyebab, target waktu, lokasi kinerja, target/sasaran kinerja, langkah-langkah kinerja;
- Pengukuran kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi yang akuntabel) dalam menganalisis data (angka akhir, grafik, persentase).

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,1 atau 74% dari bobot sebesar 15 yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai | % |
|-----|---|-------|-------|-----|
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,1 | 74 |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (Keberadaan) | 3 | 2,7 | 90% |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (Kualitas) | 4,5 | 3,15 | 70% |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (Pemanfaatan) | 7,5 | 5,25 | 70% |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Telah melakukan pemenuhan dokumen pelaporan kinerja;
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra);
- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- d. Dari aspek kualitas dokumen pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan yaitu dokumen Laporan Kinerja tidak menginformasikan perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja di tingkat nasional;
- e. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 16,75 atau 67% dari bobot sebesar 25 yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai | % |
|-----|---|-------|-------|-----|
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 16,75 | 67 |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (Keberadaan) | 5 | 3,5 | 70% |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai | 7,5 | 4,5 | 60% |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja (Pemanfaatan) | 12,5 | 8,75 | 70% |

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum adanya tim teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (SKPD) dan SOP pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum tersedia;
- b. Evaluasi AKIP internal belum menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi;
- c. Dari 5 (lima) rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya baru 3 (tiga) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan implementasi SAKIP, Kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor agar melakukan langkah-langkah secara nyata dalam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja lebih spesifik dengan menggunakan ukuran SMART, penyesuaian dan memperhatikan kinerja bidang lain (unit kerja).

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran kinerja harus memuat informasi mengenai deskripsi, penyebab adanya kinerja, target waktu, lokasi kinerja, target/sasaran kinerja, langkah-langkah kinerja, dan berapa biayanya;
- b. Pengukuran kinerja harus memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi yang akuntabel) dalam menganalisis data (angka akhir, grafik, persentase).

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja harus menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;
- b. Laporan Kinerja disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tidak mengurangi substansi Sistematis laporan yang dianjurkan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II Peraturan tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Agar menyusun/membuat SOP evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - b. Evaluasi AKIP internal harus menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) yang terintegrasi dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internalnya harus dilaksanakan secara periodik;
 - c. Membuat rencana aksi dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi dan mengidentifikasi risiko serta meningkatkan kepatuhan dan pengendalian intern dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 - d. Segera menindaklanjuti 2 (dua) rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

III. Penutup

A. Simpulan

Memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor memperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar **70,75** Nilai tersebut masuk dalam kategori/predikat **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik** sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

| No | Komponen | Sub Komponen 1 (Keberadaan) | Sub Komponen 2 (Kualitas) | Sub Komponen 3 (Pemanfaatan) | Total Bobot |
|------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Perencanaan Kinerja | 4,8 | 7,2 | 12 | 24 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 3,6 | 6,3 | 9 | 18,9 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 2,7 | 3,15 | 5,25 | 11,1 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 3,5 | 4,5 | 8,75 | 16,75 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | | | 70,75 |

B. Penguatan/Dorongan SAKIP

Dalam rangka penguatan/dorongan atas Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi SAKIP diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari pimpinan serta seluruh pejabat struktural dan staf secara konsisten dan berkesinambungan;
2. Keterlibatan pimpinan serta seluruh pejabat struktural dan staf agar lebih komprehensif dalam mengarahkan proses penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Program Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi hingga Perjanjian Kinerja Individu) dan terlibat aktif dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
3. Pengelolaan akuntabilitas kinerja agar menyusun dokumen perencanaan kinerja yang berkualitas, yaitu: (a) Dokumen Renstra yang disusun berdasarkan pedoman dan sudah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 5 tahun; (b) Menetapkan tujuan, sasaran, target, dan melakukan penyelarasan tugas dan fungsi mulai dari tingkat Dinas hingga UPT; dan (c) Proses penyusunan program/kegiatan menjadikan permasalahan utama atau isu-isu strategis serta penganggaran program/kegiatan dilakukan secara transparan dan akuntabel, efektif dan efisien;
4. Pengoptimalan pencapaian target kinerja agar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pejabat struktural dan staf serta meningkatkan pemahaman/pengetahuan atas ketentuan/peraturan terkait pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP untuk mendukung tingkat pencapaian target kinerja organisasi;
5. Perbaikan kinerja pelayanan dan pengelolaan atas penyediaan perumahan dan permukiman kumuh secara keseluruhan, serta menciptakan inovasi layanan baik yang dilakukan secara online maupun offline.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.


PIN. INSPEKTUR,
Drs. M. MAKHUR ROZAK, M.M.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19661024 199202 1 002

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.

Evaluasi Hasil terhadap Rencana Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Rencana Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor
Periode Pelaksanaan 2023

| Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | | | | | Satuan | Target | Realisasi Capaian | | Tingkat Capaian (%) | |
|---|--|--|--|--|--------|--------|-------------------|--|---------------------|--|
| Tujuan Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 Persentase permukiman layak | | | | | % | 100,00 | 99,83 | | 99,83 | |
| Sasaran Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| 1 Persentase penyediaan rumah layak huni | | | | | % | 35,84 | 31,27 | | 87,24 | |
| 2 Persentase luas permukiman kumuh | | | | | % | 0,00 | 0,021 | | 93,12 | |
| 3 Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | | | | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 4 Tingkat pelayanan unsur pertanahan | | | | | % | 100,00 | 88,96 | | 88,96 | |

| Kode | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|-------|--|-----------------|-------|---|-----|--|----------------|--|----------------|--|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|--|-------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 11 = 7 + 8 + 9 + 10 | | | 12 = 11 / 6 * 100 | | | 13 = 11 + 5 | | | 14 = 13 / 4 * 100 | | | |
| a | b | c | d | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Uraian Pemerintahan tajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | Program Pengembangan Permukiman | Persentase Infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | 50,00 | % | 187.867.703.326 | 55,25 | 113.898.420.119 | 50 | % | 19.732.073.045 | 60 | 19.079.363.886 | 100 | 96,49 | 106,25 | 132.977.784.005 | 212,50 | 70,78 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | Penyalenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara | 108 | Lokasi | 187.867.703.326 | 170 | 113.898.420.119 | 14 | Lokasi | 19.732.073.045 | 14 | 19.079.363.886 | 100 | 96,69 | 184,00 | 132.977.784.005 | 170,37 | 70,78 | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jembatan Rawayan yang dibangun | 93 | Unit | 103.706.845.829 | 63 | 61.863.563.950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | Sistem Jaringan | 7.820.984.743 | 1 | 7.552.998.259 | 100 | 96,37 | | 69.416.562.209 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah TPU yang dibangun fasilitasnya | 15 | TPU | | 11 | - | 9 | | | 9 | | 100,00 | | | 20 | | 133,33 | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah TPU yang terpelihara | 23 | TPU | | 17 | - | 1 | | | 1 | | 100 | | | 18 | | 78,26 | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Jembatan lingkungan yang dibangun | - | | | 1 | - | 1 | | | 1 | | 100 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | Pemeliharaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah taman kota dan taman jalur jalan yang terbangun dan/atau tertata | 22 | Lokasi | 84.160.839.497 | 14 | 52.034.856.169 | 7 | Lokasi | | 7 | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | Sistem Jaringan | 11.911.088.302 | 1 | 11.526.365.627 | 100 | 96,77 | | 63.561.221.796 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah taman yang terjaga dan terpelihara | 43 | Lokasi | | 64 | | 36 | Lokasi | | 36 | | 100 | | | 100 | | 232,56 | | | | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | |
|------|---|---|---|---|--|--|--|---------|-----------------|--|-----------------|--|---------|----------------|---|----------------|--|-------|--|-----------------|--|-------|
| | | | | | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase bangunan gedung yang tertata | 100 | % | 139.795.561.953 | 100 | 106.804.906.132 | 100 | % | 20.690.643.063 | 100 | 23.468.309.905 | 100 | 91,38 | 100 | 130.273.216.037 | 100 | 93,19 |
| 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan gedung yang dibangun | 13 Gedung | | 139.795.561.953 | 9 | 106.804.906.132 | 4 Gedung | | 20.690.643.063 | 4 | 23.468.309.905 | 100 | 91,38 | 13 | 130.273.216.037 | 100,00 | 93,19 |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | | | | 1.850 | Dokumen | 2.362.778.799 | 1.952 | 2.317.802.458 | 105,51 | 98,10 | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT I | | | | | | 400 | Dokumen | 202.840.748 | 668 | 195.281.998 | 163,75 | 96,77 | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT II | | | | | | 200 | Dokumen | 148.388.590 | 293 | 141.440.140 | 146,50 | 95,32 | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG UPT III | | | | | | 165 | Dokumen | 255.631.639 | 223 | 254.759.546 | 135,15 | 99,65 | | | | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan gedung yang dibangun | 13 Gedung | | 139.795.561.953 | 9 | 106.804.906.132 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | Dokumen | 22.720.983.287 | 1 | 20.558.025.763 | 100 | 90,48 | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan teknis yang disusun | 11 | Dokumen | | 14 | - | 9 | | | 9 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen pengawasan kegiatan konstruksi bangunan gedung | 11 | Dokumen | | 11 | - | 6 | | | 6 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pagar yang terbangun | 1 | Unit | | 1 | - | 1 | | | 1 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Gedung yang direhabilitasi | 1 | Gedung | | 3 | - | 2 | | | 2 | | 100 | | | | | |

[illegible]

| Kode | Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output/Hasil/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang direalisasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang direalisasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | |
|------|--|---|--|---------|-----------------|--|----------------|---|------------|----------------|--|----------------|--|--------|--|----------------|--|-------|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | Facilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah dokumen Surat Permits dan Telenis yang dikaji rencana tekniknya | 3000 | Dokumen | 785.826.034 | 1768 | 517.671.521 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen pengesahan dan pengendalian pembangunan dalam Kawasan perumahan | 0 | Dokumen | | 3 | - | | | | | | | | | | | |
| | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB) | Jumlah surat keterangan pemaknaan bangunan gedung | 2000 | Dokumen | | 1768 | 789.172.784 | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKKB) | Jumlah surat keterangan pemanfaatan bangunan gedung | 2000 | Dokumen | | 1.768 | 517.671.521 | | | | | | | | | | | |
| | Program Kawasan Permukiman | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang telah direhabilitasi | 33,80 | % | 150.637.390.593 | 59,61 | 68.436.683.996 | 33,80 | % | 28.082.344.740 | 24,84 | 27.873.474.228 | 73,49 | 99,26 | 84,45 | 86.310.158.224 | 2,50 | 57,30 |
| | | Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 100 | % | | 63,32 | - | 100 | % | | 29,80 | | 93,12 | | 93,12 | | 93,12 | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani | 154,4 | Ha | 2.975.022.030 | 97,75 | 2.791.492.783 | 154,4 | Ha | 130.022.975 | 46,01 | 130.000.666 | 93,12 | 99,98 | 143,77 | 2.921.494.449 | 93,12 | 73,80 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | 1 | Dokumen | 28.656.910 | 1 | 28.634.600 | 100 | 99,92 | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh | Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 99,84 | Ha | 2.522.111.095 | 43,2 | 1.994.345.695 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh | | | | | | 1 | Laporan | 101.366.066 | 1 | 101.366.066 | 100 | 100,00 | | | | |
| | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Jumlah dokumen rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | 5 | Dokumen | 1.452.910.935 | 4 | 797.148.088 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi | 12000 | Unit | 140.410.357.414 | 3.196 | 52.015.381.905 | 1200 | unit | 27.982.321.764 | 1.193 | 27.743.473.562 | 99,42 | 99,25 | 4.389 | 79.758.858.467 | 36,56 | 56,80 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | Dokumen | 310.986.032 | 1 | 263.188.222 | 100 | 84,63 | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Karya Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Diperbaiki | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | 12000 | Unit | 128.595.503.739 | 2031 | 49.516.609.811 | 1200 | Unit Rumah | 19.104.443.665 | 1.193 | 18.953.237.335 | 99,42 | 99,21 | 2.393 | 68.469.847.146 | 19,94 | 53,24 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | | | | 7 | Lokasi | 8.406.451.797 | 7 | 8.398.928.153 | 100 | 99,91 | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target Kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | |
|------|---|--|--|---|---|--|------|--|----------------|-------------|---|-------------|--|-------|--|-------------|--|-------|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | | | | 33,28 | Ha | | 33,28 | | 100,00 | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi | | 1 | Dokumen | 130.440.370 | 1 | 128.119.850 | 100 | 98,22 | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan Permukiman Kumuh | Jumlah Lokasi yang tertangani Infrastruktur sosial ekonomi wilayahnya | 627 | Lokasi | 11.814.853.673 | 48 | 2.498.772.094 | | | | | | | |
| | | | | | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji | 4688 | Dokumen | 6.252.011.149 | 3431,00 | 3.629.808.308 | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Jumlah bangunan non perumahan yang distasi dan dikendalikan | 250 | Bangunan | 660.763.397 | 257,00 | 308.441.750 | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT I) | Jumlah dokumen pengaduan dan pengendalian bangunan di wilayah UPT I | 12 | Dokumen | 323.943.447 | 12,00 | 148.292.823 | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT II) | Jumlah dokumen pengaduan dan pengendalian di wilayah UPT II | 12 | Dokumen | 278.965.003 | 12,00 | 129.641.600 | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (UPT III) | Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Di wilayah UPT III | 12 | Dokumen | 412.020.039 | 12,00 | 191.741.874 | | | | | | | |
| | | | | | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis non perumahan yang dikaji | 1600 | Dokumen | 3.021.669.774 | 1108,00 | 1.907.261.189 | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah RKB/SLF yang dikeluarkan | 350 | Dokumen | - | 396,00 | - | | | | | | | |
| | | | | | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT I) | Jumlah gambar situasi wilayah UPT I yang dikeluarkan | 1200 | Berkas | 530.259.304 | 1268,00 | 299.681.011 | | | | 1.268,00 | 299.681.011 | 103,67 | 56,52 |
| | | | | | | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan luas sampai dengan 300 m2 di wilayah UPT I yang dikaji | 18 | Berkas | - | 18,00 | - | | | | | | | |
| | | | | | Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT II) | Jumlah gambar situasi wilayah UPT II yang dikeluarkan | 900 | Berkas | 410.175.413 | 502,00 | 237.843.172 | | | | 502,00 | 237.843.172 | 55,78 | 57,99 |

| Kode | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023 yang divaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah kabupaten yang divaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kerja PD Tahun 2022 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | |
|------|---|---|--|-----------|---------------|--|---------------|--|-----------|----------------|--|----------------|--|-------|--|----------------|--|-----------|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan husean sampai dengan 300 m2 ditilayah UPT II yang dikaji | 14 | Berkas | - | 13,00 | - | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (UPT III) | 600 | Berkas | 612.314.768 | 561,00 | 406.904.889 | | | | | | | | 561,00 | 406.904.889 | 93,50 | 66,43 |
| | | Jumlah Surat Pertimbangan Teknis rumah tinggal dengan husean sampai dengan 300 m2 ditilayah UPT III yang dikaji | 6 | Berkas | - | 6,00 | - | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 81,1 | % | 3.448.552.841 | 129,41 | 1.153.834.928 | 81,10 | % | 17.354.055.628 | 79,20 | 16.572.967.063 | 97,78 | 95,80 | 207,70 | 17.726.801.991 | 256,11 | 1536,34 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Uraian Penyelenggaraan PSU Perumahan | 46 | Perumahan | 3.448.552.841 | 40 | 1.153.834.928 | 46 | Perumahan | 17.354.055.628 | 44,00 | 16.572.967.063 | 97,78 | 95,80 | 84,00 | 17.726.801.991 | 186,67 | 1536,34 |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | 45 | Dokumen | 658.171.209 | 5 | 590.834.400 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | | | | | 1 | Dokumen | 285.685.493 | 1 | 282.358.875 | 100 | 98,84 | 6 | 873.193.275 | 13 | 132.66963 |
| | | Jumlah PSU perumahan yang terlanter dan terdata | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Pungai Hunian | 25 | Perumahan | 2.483.977.906 | 33 | 406.462.628 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Pungai Hunian | | | | | | 5 | Lokasi | 16.596.058.563 | 4 | 15.863.870.740 | 80 | 95,59 | | | | |
| | | Jumlah Penambahan Calon Aset Pemda dari PSU Perumahan | | | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 180 | Perumahan | 304.403.726 | 115 | 156.337.900 | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | | | | | | 1 | Laporan | 94.643.897 | 1 | 82.517.950 | 100 | 87,19 | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang | | | | | | 40 | Dokumen | 377.665.575 | 36 | 344.219.498 | 90,00 | 91,14 | | | | |
| | | Uraian Pemerintahan Bidang Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 100 | % | 2.990.672.934 | 68,00 | 1.849.325.079 | 100 | % | 764.590.024 | 100 | 523.765.500 | 100 | 68,76 | 168 | 2.375.090.579 | 168,00 | 79,43 |
| 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 28 | Sengketa | 2.990.672.934 | 12 | 1.849.325.079 | 10 | Sengketa | 764.590.024 | 10 | 523.765.500 | 100 | 68,76 | 22 | 2.375.090.579 | 88,00 | 79,43 |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 25 | Sengketa | 2.990.672.934 | 12 | 1.849.325.079 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 500 | bidang | | 500 | - | 1 | Dokumen | 764.590.024 | 1 | 523.765.500 | 100 | 68,76 | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023 yang divaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang divaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | | | |
|------|----|----|---|---|--|---|--|---------|----------------|--|----------------|--|---------|---------------|--|---------------|--|-------|--|----------------|--------|--------|
| | | | | | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 2 | 10 | 6 | | | Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kolektif Wakaf dan Tanah Absente | Persentase lahan kosong yang didistribusi | 100 | % | 284.363.719 | 0 | - | | % | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kolektif Wakaf dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase lahan kosong yang didistribusi | 5 | Lokasi | 284.363.719 | - | - | | % | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Jumlah lokasi inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah | 5 | Lokasi | 284.363.719 | - | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | - | - | | Dokumen | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 8 | | | Program Pengelolaan Tanah Kosong | Persentase tanah kosong yang teridentifikasi | 100 | % | 366.970.114 | 66,66 | 281.993.760 | 100 | % | 302.281.800 | 100 | 301.653.000 | 100 | 99,79 | 166,66 | 583.646.750 | 166,7 | 169,04 |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | Inventarisasi dan Pemertanahan Tanah Kosong | Jumlah tanah kosong yang telah teridentifikasi | 15 | Bidang | 366.970.114 | 15 | 281.993.760 | 15 | Bidang | 302.281.800 | 15 | 301.653.000 | 100 | 99,79 | 30,00 | 583.646.750 | 200 | 169,04 |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Jumlah Dokumen Data inventarisasi Tanah Kosong | 15 | Dokumen | 366.970.114 | 2 | 281.993.760 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi | | | | | | 1 | Laporan | 302.281.800 | 1 | 301.653.000 | 100 | 99,79 | 3 | 583.646.750 | 20,00 | 169,04 |
| 2 | 10 | 10 | | | Program Penatagunaan Tanah | Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum | 100 | % | 14.886.833.244 | 78,98 | 12.847.809.119 | 43,81 | % | 7.548.104.227 | 43,81 | 7.356.586.283 | 100 | 97,50 | 119,46 | 19.904.395.402 | 119,46 | 136,46 |
| 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | Penggunaan Tanah yang Harapannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Persentase bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | 100 | % | 14.886.833.244 | 78,98 | 12.847.809.119 | 48,98 | % | 7.548.104.227 | 48,98 | 7.356.586.283 | 100 | 97,50 | 121,93 | 19.904.395.402 | 121,93 | 136,46 |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN I | 100 | % | 4.315.538.596 | 169,649 | 7.998.423.047 | 11,747 | Ha | | 11.747 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Persentase bidang tanah yang diproses PBT nya melalui PTSL di BPN II | | | | | | 5.798 | Ha | | 5.798 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Target SHAT (BPN I) | 100 | Bidang | | 90.000 | | 42.000 | Bidang | | 42.000 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Target SHAT (BPN II) | | | | | | 13.468 | Bidang | | 13.468 | | 100 | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | Laporan | 5.642.242.897 | 1 | 5.556.263.006 | 100 | 98,48 | | | | |
| | | | | | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Ketentangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Zona Nilai Tanah | 1 | Dokumen | 90.630.000 | 1 | 77.689.000 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | 3.850 | Bidang | 10.180.454.648 | 2.924 | 4.471.697.072 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya | 3850 | Bidang | | | | 600 | Bidang | | 707 | | 117,83 | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rastera Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rastera Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rastera Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rastera Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | |
|------|---|---|---|---|--|--|---------|----------------|--|----------------|--|-------------|----------------|---|----------------|--|-------|--|-----------------|--|--------|
| | | | | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Ketenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 1 | Dokumen | 1.902.861.630 | 1 | 1.800.323.277 | 100 | 94,61 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | Program Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terhadapitadnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 100 | % | 91.194.530.525 | 197 | 71.514.864.607 | 100 | % | 37.123.817.360 | 93,03 | 34.696.670.346 | 93,03 | 93,46 | 290 | 106.311.834.953 | 290,03 | 116,58 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terwujud | 15 | Dokumen | 1.507.098.942 | 39 | 1.366.815.733 | 15 | Dokumen | 822.212.300 | 15 | 816.912.137 | 100,00 | 99,36 | 64,00 | 2.183.427.870 | 360,00 | 144,88 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | Dokumen | 607.589.477 | 10 | 450.491.379 | 8 | Dokumen | 293.389.666 | 8 | 289.525.566 | 100,00 | 98,68 | 18,00 | 740.016.945 | 900,00 | 121,80 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 65.891.649 | 2 | 36.549.350 | 1 | Dokumen | 36.913.700 | 1 | 35.975.200 | 100,00 | 97,46 | 3,00 | 72.524.350 | 300,00 | 110,07 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 64.447.677 | 4 | 45.767.400 | 1 | Dokumen | 35.741.850 | 1 | 35.656.600 | 100,00 | 99,76 | 5,00 | 81.424.000 | 500,00 | 126,34 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 67.031.406 | 5 | 36.062.100 | 2 | Dokumen | 29.513.850 | 2 | 29.475.850 | 100,00 | 99,87 | 7,00 | 65.337.950 | 350,00 | 97,77 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 94.356.726 | 14 | 32.791.000 | 2 | Dokumen | 31.183.650 | 2 | 31.106.500 | 100,00 | 99,75 | 16,00 | 63.697.500 | 600,00 | 67,72 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | Dokumen | 68.098.928 | 11 | 38.746.000 | 4 | Laporan | 28.444.900 | 4 | 28.431.250 | 100,00 | 99,95 | 15,00 | 67.177.250 | 375,00 | 98,65 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | Dokumen | 539.683.079 | 6 | 726.108.504 | 4 | Laporan | 367.024.684 | 4 | 366.741.171 | 100,00 | 99,92 | 10,00 | 1.092.849.675 | 500,00 | 202,50 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | Aktivitas Ketahanan Perangkat Daerah | Jumlah laporan ketahanan perangkat daerah | 7 | Dokumen | 64.087.339.988 | 13 | 47.795.621.873 | 7 | Dokumen | 25.222.956.068 | 7 | 23.596.507.790 | 100,00 | 93,65 | 20,00 | 71.392.129.663 | 285,71 | 111,40 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan PNS Perangkat Daerah yang terbayarkan | 12 | bulan | 63.408.277.848 | 26 | 47.399.284.781 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 171 | | 163 | Orang/bulan | 24.970.477.068 | 150 | 23.952.657.416 | 92,02 | 93,52 | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen hasil pengujian/verifikasi keuangan | 1 | Laporan | 498.386.741 | 2 | 302.771.792 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | 12 | Dokumen | 203.235.374 | 12 | 196.184.424 | 100,00 | 96,53 | 14 | 498.956.216 | 1.400 | 100,11 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Laporan akuntansi SKPD | 1 | Laporan | 18.672.247 | 2 | 10.804.350 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | 2 | Dokumen | 10.254.800 | 2 | 10.169.750 | 100 | 99,17 | 4 | 20.974.100 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | Laporan | 49.053.759 | 2 | 22.673.450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | 1 | Laporan | 20.684.902 | 1 | 20.535.000 | 100 | 99,28 | 3 | 43.208.450 | 300 | 0,00 |

| Kode | Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang divaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang divaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|----|--|--|-----|---|---------------|-----|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|-------------|---------------|--------|------|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 1 | Laporan | 17.309.316 | 1 | 4.751.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tritulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/tritulan/semesteran | 18 | Dokumen | 67.848.935 | 19 | 39.351.250 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Tritulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD | | | | | 2 | Laporan | 16.303.924 | 2 | 16.961.200 | 100 | 92,66 | 21 | 56.312.450 | 117 | 0,0001474 | | |
| | | | | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan analisis prognosis realisasi anggaran | 1 | Laporan | 27.791.142 | 2 | 15.984.750 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dikelola | 6 | Dokumen | 153.622.574 | 10 | 116.619.481 | 6 | Dokumen | 69.239.737 | 6 | 69.129.166 | 100 | 99,84 | 16 | 185.748.647 | 257 | 0,00 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah barang milik daerah yang dikelola | 6 | Dokumen | 153.622.574 | 10 | 116.619.481 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | 4 | Laporan | 69.239.737 | 4 | 69.129.166 | 100 | 99,84 | 14 | 185.748.647 | 233 | 0,00 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | 1 | Laporan | 68.556.150 | 1 | 67.583.550 | 100 | 98,58 | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | | 1 | Dokumen | 68.556.150 | 1 | 67.583.550 | 100,00 | 98,58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang terselani administrasinya | 17 | Layanan | 1.892.465.617 | 21 | 1.239.305.072 | 17 | Layanan | 989.362.957 | 17 | 909.458.148 | 100 | 91,92 | 38 | 2.148.763.220 | 223,83 | 0,00 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen administratif kepegawaian | 12 | Bulan | 1.097.878.210 | 24 | 526.538.772 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 | Orang | | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | 10 | Dokumen | 769.381.276 | 10 | 731.681.988 | 100 | 95,13 | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan | 15 | Orang | 334.124.847 | 25 | 173.400.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 16 | Orang | 148.499.877 | 16 | 129.308.760 | 100,00 | 87,08 | 41 | 302.708.760 | 273,33 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 17 | Orang | 432.943.810 | 66 | 132.578.800 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 60 | Orang | 71.481.804 | 60 | 48.267.400 | 100 | 67,52 | 126 | 180.846.200 | 741,18 | 0,00 | |
| | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta atribut (Tenaga Rakulimen, Satpam, OB) | 55 | Stel | 28.100.750 | 193 | 406.737.500 | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Rencana Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023 | | | Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022 | | Target kinerja dan anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2023 (%) | | | | | |
|------|---|--|--|-------|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|--|-------|----|----------------|--------|-----------|
| | | | K | S | Rp. | K | Rp. | K | S | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | | | | Unit | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 16 | Unit | 5.988.008.150 | 7 | 2.707.292.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 6 | Unit | 560.147.674 | 6 | 555.869.000 | 100 | 95,82 | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | 48 | Unit | 393.119.000 | 231 | 2.739.499.850 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan | | | | | | 43 | Unit | 926.604.890 | 43 | 914.080.000 | 100,00 | 98,65 | 294 | 3.653.579.850 | 613 | 0,000 | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan pelayanan jasa pemungjung urusan pemerintahan daerah | 17 | Layanan | 7.367.681.083 | 20 | 8.205.426.179 | 17 | Layanan | 3.241.497.417 | 17 | 2.974.268.794 | 100 | 91,82 | 37 | 8.181.694.973 | 217,65 | 111,05 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah material yang tersedia | 12 | Bulan | 18.311.032 | 24 | 17.030.000 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 1 | Laporan | 15.259.437 | 1 | 15.104.000 | 100 | 98,98 | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | Bulan | 2.365.902.803 | 24 | 1.500.193.276 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | 1 | Laporan | 1.154.958.420 | 1 | 1.025.999.437 | 100 | 88,83 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rekening Listrik yang Dibayarkan | 12 | Bulan | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Rekening Telephon yang Dibayarkan | 12 | Bulan | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Tagihan Internet yang Dibayarkan | 12 | Bulan | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan pelayanan jasa umum kantor | 12 | Bulan | 4.983.367.217 | 24 | 8.688.200.903 | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | 1 | Laporan | 2.071.279.560 | 1 | 1.935.165.357 | 100 | 93,43 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Petugas Keamanan yang Dilayani | 30 | Orang | | 58 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Petugas Kebersihan yang Dilayani | 27 | Orang | | 54 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Upah Kerja Pegawai Honorer | 14 | Orang | | 27 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara | 17 | Layanan | 4.861.814.945 | 20 | 7.858.441.572 | 17 | Layanan | 2.830.676.745 | 17 | 2.682.195.629 | 100 | 94,75 | 37 | 10.540.637.201 | 218 | 216,61795 |

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI
TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE : 1 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

SATKER : 1.03.1.04.2.10.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

| No | Uraian | Pagu Anggaran | Jumlah Realisasi (Rp.) | | | Lebih / (Kurang) | |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| | | | S/D Periode Lalu | Periode Ini | Total | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6 - 3 | 8 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 97.750.000.000,00 | 0,00 | 69.558.846.012,00 | 69.558.846.012,00 | (28.191.153.988,00) | 71,16 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 97.750.000.000,00 | 0,00 | 69.425.396.012,00 | 69.425.396.012,00 | (28.324.603.988,00) | 71,02 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 | 133.450.000,00 | 133.450.000,00 | 133.450.000,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 97.750.000.000,00 | 0,00 | 69.558.846.012,00 | 69.558.846.012,00 | (28.191.153.988,00) | 71,16 |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 304.091.250.665,00 | 0,00 | 298.431.002.041,00 | 298.431.002.041,00 | (5.660.248.624,00) | 98,14 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 24.971.231.868,00 | 0,00 | 23.352.657.416,00 | 23.352.657.416,00 | (1.618.574.452,00) | 93,52 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 249.281.018.787,00 | 0,00 | 245.441.372.685,00 | 245.441.372.685,00 | (3.839.646.102,00) | 98,46 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 8.500.000.000,00 | 0,00 | 8.427.971.940,00 | 8.427.971.940,00 | (72.028.060,00) | 99,15 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 21.339.000.010,00 | 0,00 | 21.209.000.000,00 | 21.209.000.000,00 | (130.000.010,00) | 99,39 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 64.424.267.021,00 | 0,00 | 56.390.642.540,00 | 56.390.642.540,00 | (8.033.624.481,00) | 87,53 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 4.761.673.621,00 | 0,00 | 4.584.339.295,00 | 4.584.339.295,00 | (177.334.326,00) | 96,28 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 24.420.841.236,00 | 0,00 | 23.013.701.350,00 | 23.013.701.350,00 | (1.407.139.886,00) | 94,24 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 34.907.702.164,00 | 0,00 | 28.594.744.395,00 | 28.594.744.395,00 | (6.312.957.769,00) | 81,92 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 334.050.000,00 | 0,00 | 197.857.500,00 | 197.857.500,00 | (136.192.500,00) | 59,23 |
| | JUMLAH BELANJA DAERAH | 368.515.517.686,00 | 0,00 | 354.821.644.581,00 | 354.821.644.581,00 | (13.693.873.105,00) | 96,28 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (270.765.517.686,00) | 0,00 | (285.262.798.569,00) | (285.262.798.569,00) | (14.497.280.883,00) | 105,35 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | (270.765.517.686,00) | 0,00 | (285.262.798.569,00) | (285.262.798.569,00) | (14.497.280.883,00) | 105,35 |



PEMERINTAHAN KOTA DEPOK
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 – Jawa Barat Telp/Fax. (021) 7762958

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---|-------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik | 1. | Predikat SAKIP | Nilai | 77.25 BB | 77.25 BB | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | 2. | Rasio permukiman layak | % | 0,9990 | 0,9992 | 100,02 |

**Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok**


Dadan Rustandi, ST, M.Si
NIP. 19700511 200312 1 001



PEMERINTAHAN KOTA DEPOK
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 – Jawa Barat Telp/Fax. (021) 7762958

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|-------------------|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan fasilitas PSU perumahan | 1. | Persentase Perumahan dengan PSU Tertangani | % | 57.06% | 57,45 | 100,68 |
| 2 | Meningkatnya pelayanan dan ketersediaan perumahan bagi MBR | 2. | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau | % | 10.62 | 4,35 | 40,95% |
| 3 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman tertangani | .3 | Persentase luasan Permukiman Kumuh Tertangani | % | 88,92 | 90,57 | 101,85 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman | 4. | Persentase Capaian Cakupan layanan Dinas Perumahan dan Permukiman. Nilai SAKIP | Poin | 77.25 | 77.25 | 100 |
| 5. | Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Pelayanan Publik | 5. | Persentase Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Pelayanan Publik yang tertangani | % | 100 | 96,15% | 96,15 |
| 6 | Meningkatnya Pengadaan Lahan Pemerintah dan Kepentingan Umum yang difasilitasi. | 6. | Persentase Pengadaan Lahan Pemerintah dan Kepentingan Umum yang difasilitasi | % | 100 | 100 | 100 |

**Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok**


Dadan Rustandi, ST, M.Si
NIP. 19700511 200312 1 001